

**PERTANGGUNGJAWABAN – PELAKSANAAN – APBD - 2015
2015**

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 6. LD. 2015/NO. 6. LL. SETDA KOTA SALATIGA :
20 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014**

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) UU No/ 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya Daerah Tingkat II kota Salatiga dan Kabupaten Daerah tingakat II Semarang, PP No. 24 Tagun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, PP No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar

pelayanan minimal, PP No. 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, PP No. 69 tahun 2010 tentang pemberian insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP N. 30 tahun 2011 tentang pinjaman Daerah, PP No. 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah, PP No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD, Perda Propinsi Jawa Tengah No. 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah, Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 5 tahun 1981 tentang pendirian perusahaan Daerah air minum kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah, Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2007 tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 11 tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja dinas Daerah kota salatiga, Perda Kota Salatiga No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah, kantor pelayanan perizinan terpadu, dan satuan polisi pamong praja kota salatiga. Perda Kota Salatiga No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja kecamatan dan keluarahan kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dana cadangan, Perda Kota Salatiga No 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2011 tentang pajak air tanah, Perda Kota Salatiga No. 12 Tahun

2011 tentang retribusi jasa umum, Perda Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 14 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah kota salatiga, Perda Kota Salatiga No. 2 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, Perda kota Salatiga No. 9 tahun 2013 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Kota Salatiga No. 11 tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah Daerah pada perusahaan Daerah kota salatiga, perusahaan Daerah badan kredit kecamatan sidorejo, perseroan terbatas pusat rekreasi dan promosi pembangunan jawa tengah dan perseroan terbatas bank pembangunan Daerah jawa tengah, Perda Kota Salatiga No. 1 tahun 2014 tentang APBD Daerah tahun anggaran 2014, Perda Kota Salatiga No. 7 Tahun 2014 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2014.

- Peraturan Daerah ini berisi tentang : Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2014, yang berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Ditulis secara rinci dalam angka-angka yang jelas.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 31 Juli 2015.